



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Februari 2024/Periodik - 2023)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
**UNIT KERJA** : DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

**I. DATA PRIBADI**

- Nama : Diana Kusumastuti
- Jabatan : DIREKTUR JENDERAL CIPTA KARYA
- NHK : 433027

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 2.240.000.000

- Tanah dan Bangunan Seluas 110 m<sup>2</sup>/80 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 270.000.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 367 m<sup>2</sup>/300 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 72 m<sup>2</sup>/45 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 620.000.000
- Tanah Seluas 240 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA KOTA SURAKARTA , WARISAN Rp. 650.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 669.600.000

- MOBIL, HONDA RW1D-1.5 TC PRESTIGE CVT CKD / CR-V CRYSTAL BLACK PEARL Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 669.600.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. ---**D. SURAT BERHARGA** Rp. ---**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 3.482.651.463**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---**Sub Total** Rp. 6.392.251.463**III. HUTANG** Rp. ---**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 6.392.251.463

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta



kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.